

Judul : Presiden Prabowo belum kirimkan surat pergantian Kapolri ke DPR
Tanggal : Minggu, 14 September 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

POLRI

Presiden Prabowo Belum Kirimkan Surat Pergantian Kapolri ke DPR

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto belum mengirimkan surat presiden tentang pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo ke DPR. Dengan demikian, posisi Listyo sebagai Kapolri masih bertahan.

"Berkenaan dengan surpres (surat presiden) pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar. Belum ada surpres yang dikirim ke DPR mengenai pergantian Kapolri," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden Prasetyo Hadi melalui pesan suara, Sabtu (13/9/2025) petang.

Ia melanjutkan, "Sebagaimana juga sudah disampaikan oleh pimpinan DPR bahwa memang belum ada atau tidak ada surpres tersebut."

Dengan belum adanya surpres, dapat dipastikan bahwa Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo tetap menjabat Kapolri. Sebab, Presiden Prabowo belum akan mengganti Listyo.

Kabar adanya surpres untuk pergantian Kapolri berembus kencang sejak Jumat (12/9). Meski demikian, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Nasdem Suan Mustopa menepis kabar tersebut. "Sampai hari ini belum," balasnya saat dihubungi melalui pesan singkat dari Ja-

karta, Sabtu siang.

Saan yang juga Wakil Ketua Umum Partai Nasdem itu pun menolak berkomentar terkait isu pergantian Kapolri.

Sejumlah anggota Komisi III DPR yang ditanya soal isu pergantian Kapolri juga mengaku belum mengetahuinya.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil, misalnya, belum bisa memastikan kabar tersebut. Meski demikian, dia mengaku sudah banyak pihak yang menanyakan kebenaran informasi terkait pergantian Kapolri itu.

"Isu ini sudah sangat ramai yang bertanya. Begitu pun vali-

dasinya belum bisa saya pastikan. Tapi, biasanya kalau sudah ramai begini, kepastiannya hanya 100 persen," kata Nasir.

Reformasi Polri

Pergantian Kapolri itu disinyalir menjadi salah satu benak reformasi Polri yang menjadi rencana Presiden Prabowo.

Nasir mendukung pembenahan Polri itu dipimpin langsung oleh Prabowo sendiri.

"Saran saya, Presiden Prabowo langsung memimpin reformasi kepolisian. Presiden dan pembantu bisa membantu kepolisian dengan cara mengevaluasi dan memfasilitasi agar rencana strategis itu bisa di-

pai dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia," tuturnya.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Rudianto Lallo, menyebut, Presiden Prabowo lebih mengerti dan paham kebutuhan Polri. Keinginan untuk reformasi tersebut juga perlu dihormati dan didukung.

Sebelum isu pergantian Kapolri mencuat, di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (12/9) pagi, digelar upacara kenaikan pangkat ke golongan perwira tinggi Polri untuk 27 personel polisi.

Dua di antaranya naik pangkat menjadi komisaris jenderal, yakni Kepala Badan Narkotika

Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Suyudi Ario Seto dan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri Komisaris Jenderal Karyoto.

Suyudi merupakan lulusan Akademi Polisi (Akp) tahun 1994. Sebelum menjabat Kepala BNN, ia menjabat Kepala Polda Banten pada 2024-2025. Ia juga pernah menjabat Wakil Kepala Polda Metro Jaya 2023-2024.

Adapun Karyoto menyelesaikan pendidikan di Akpol pada 1990. Sebelum menjabat Kepala Baharkam, Karyoto pernah menjabat Kepala Polda Metro Jaya. Ia juga pernah menjabat Deputi Penindakan di Komisi Pemberantasan Korupsi pada

2020.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan menilai reformasi Polri belum tuntas sejak pemisahan TNI-Polri pada 1999. Ada sekitar 130 permasalahan yang menjadi pemicu stagnasi reformasi Polri, mulai dari impunitas, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, hingga kekerasan berlebihan terhadap masyarakat.

"Reformasi Polri adalah kebutuhan kontekstual hari ini, di mana agenda demokratis terbesarnya adalah agar kepolisian berbenah dan tentara kembali ke barak," ucap Halili.

(SIA/RTG/APA)